



WALIKOTA BATAM

**PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 07 TAHUN 2007**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2007**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2007;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2007 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4274);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
11. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

26. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran dan Pengendalian Penduduk Dalam Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 2 Seri D);
27. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2001 tentang Kebersihan Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 5 Seri B);
28. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2001 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 9 Seri B);
29. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 10 Seri B);
30. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 13 Seri C);
31. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 13 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 14 Seri C);
32. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 16 Seri A);
33. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 Tahun 2001 tentang Penerimaan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 17 Seri C);
34. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2002 tentang Ketentuan Bangunan di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2002 Nomor 2 Seri E);
35. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2002 Nomor 22 Seri E);
36. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Kepariwisata di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2003 Nomor 13 Seri C);
37. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2003 Nomor 36 Seri D);
38. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2003 Nomor 37 Seri D);

39. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2003 Nomor 38 Seri D);
40. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pemekaran, Perubahan dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2005 Nomor 65 Seri E);
41. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2005 Nomor 67 Seri A);
42. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 01 Seri D);
43. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 07 Seri B);

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM
DAN
WALIKOTA BATAM**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BATAM TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2007**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2007 semula berjumlah Rp. 881.039.000.000,00 bertambah sejumlah Rp. 15.608.603.486,87 sehingga menjadi Rp. 896.647.603.486,87 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan	
	a. Semula	Rp. 746.039.000.000,00
	b. Berkurang	<u>Rp. (64.919.522.776,00)</u>
	Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp.681.119.477.224,00

2.	Belanja		
	a. Semula	Rp. 880.039.000.000,00	
	b. Bertambah	<u>Rp. 14.058.603.486,87</u>	
	Jumlah Belanja setelah perubahan		Rp.894.097.603.486,87
	Surplus/ (Defisit) setelah perubahan		Rp.(212.978.126.262,87)
3.	Pembiayaan		
	a. Penerimaan		
	1) Semula	Rp. 135.000.000.000,00	
	2) Bertambah	<u>Rp. 80.528.126.262,87</u>	
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan		Rp.215.528.126.262,87
	b. Pengeluaran		
	1) Semula	Rp. 1.000.000.000,00	
	2) Bertambah	Rp. 1.550.000.000,00	
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan		<u>Rp. 2.550.000.000,00</u>
	Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan		Rp.212.978.126.262,87
	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp.	0,00

Pasal 2

(1)	Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
	a. Pendapatan asli daerah		
	1) Semula	Rp. 105.329.000.000,00	
	2) Bertambah	<u>Rp. 5.751.269.589,00</u>	
	Jumlah Pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp.111.080.269.589,00
	b. Dana Perimbangan		
	1) Semula	Rp. 580.210.000.000,00	
	2) Berkurang	<u>Rp. (70.670.792.365,00)</u>	
	Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan		Rp.509.539.207.635,00
	c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
	1) Semula	Rp. 60.500.000.000,00	
	2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
	Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan		Rp. 60.500.000.000,00
(2)	Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:		
	a. Pajak daerah		
	1) Semula	Rp. 68.150.000.000,00	
	2) Bertambah	<u>Rp. 2.650.000.000,00</u>	
	Jumlah Pajak daerah setelah perubahan		Rp. 70.800.000.000,00

- | | | | |
|--|-----|-------------------------|-----------------------|
| b. Retribusi daerah | | | |
| 1) Semula | Rp. | 18.995.000.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>2.630.000.000,00</u> | |
| Jumlah Retribusi daerah setelah perubahan | | | Rp. 21.625.000.000,00 |
| c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | | | |
| 1) Semula | Rp. | 800.000.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>1.419.472.019,00</u> | |
| Jumlah Retribusi daerah setelah perubahan | | | Rp. 2.219.472.019,00 |
| d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah | | | |
| 1) Semula | Rp. | 17.384.000.000,00 | |
| 2) Berkurang | Rp. | <u>(948.202.430,00)</u> | |
| Jumlah Retribusi daerah setelah perubahan | | | Rp. 16.435.797.570,00 |
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- | | | | |
|---|-----|----------------------------|-----------------------|
| a. Dana bagi hasil | | | |
| 1) Semula | Rp. | 301.219.000.000,00 | |
| 2) Berkurang | Rp. | <u>(80.943.500.314,00)</u> | |
| Jumlah Dana bagi hasil setelah perubahan | | | Rp.220.275.499.686,00 |
| b. Dana alokasi umum | | | |
| 1) Semula | Rp. | 219.300.000.000,00 | |
| 2) Berkurang | Rp. | <u>0,00</u> | |
| Jumlah Dana alokasi umum setelah perubahan | | | Rp.219.300.000.000,00 |
| c. Dana alokasi khusus | | | |
| 1) Semula | Rp. | 13.791.000.000,00 | |
| 2) Berkurang | Rp. | <u>0,00</u> | |
| Jumlah Dana alokasi khusus setelah perubahan | | | Rp. 13.791.000.000,00 |
| d. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Lainnya | | | |
| 1) Semula | Rp. | 45.900.000.000,00 | |
| 2) Berkurang | Rp. | <u>10.272.707.949,00</u> | |
| Jumlah Dana alokasi khusus setelah perubahan | | | Rp. 56.172.707.949,00 |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- | | | | |
|--|-----|-------------------|-----------------------|
| a. Dana penyesuaian dan otonomi khusus | | | |
| 1) Semula | Rp. | 60.500.000.000,00 | |
| 2) Berkurang | Rp. | <u>0,00</u> | |
| Jumlah Dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan | | | Rp. 60.500.000.000,00 |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | | | |
|---|-----|--------------------------|-----------------------|
| a. Belanja Belanja Tidak Langsung | | | |
| 1) Semula | Rp. | 291.597.638.136,50 | |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>18.462.792.571,22</u> | |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan | | | Rp.310.060.430.707,72 |

b. Belanja Belanja Langsung			
1) Semula		Rp. 588.441.361.863,50	
2) Berkurang		<u>Rp. (4.404.189.084,35)</u>	
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan			Rp.584.037.172.779,15
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:			
a. Belanja pegawai			
1) Semula		Rp. 238.543.638.136,50	
2) Bertambah		<u>Rp. 11.362.792.571,22</u>	
Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan			Rp.249.906.430.707,72
b. Belanja Bantuan Sosial			
1) Semula		Rp. 46.910.000.000,00	
2) Bertambah		<u>Rp. 7.100.000.000,00</u>	
Jumlah Belanja bunga setelah perubahan			Rp. 54.010.000.000,00
c. Belanja Bagi Hasil Kepada Kelurahan			
1) Semula		Rp. 4.344.000.000,00	
2) Bertambah		<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Belanja subsidi setelah perubahan			Rp. 4.344.000.000,00
d. Belanja tidak terduga			
1) Semula		Rp. 1.800.000.000,00	
2) Bertambah		<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan			Rp. 1.800.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:			
a. Belanja pegawai			
1) Semula		Rp. 104.072.813.510,00	
2) Berkurang		<u>Rp. (8.747.732.883,00)</u>	
Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan			Rp. 95.325.080.627,00
b. Belanja barang dan jasa			
1) Semula		Rp. 229.456.481.317,00	
2) Bertambah		<u>Rp. 23.113.837.055,50</u>	
Jumlah Belanja barang dan jasa setelah perubahan			Rp.252.570.318.372,50
c. Belanja modal			
1) Semula		Rp. 254.912.067.036,50	
2) Berkurang		<u>Rp. (18.770.293.256,85)</u>	
Jumlah Belanja modal setelah perubahan			Rp.236.141.773.779,65

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I terdiri dari :			
a. Penerimaan			
1) Semula		Rp. 135.000.000.000,00	
2) Bertambah		<u>Rp. 80.528.126.262,87</u>	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan			Rp.215.528.126.262,87

b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp.	1.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>1.550.000.000,00</u>	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan			Rp. 2.550.000.000,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:			
a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya			
1) Semula	Rp.	134.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>80.928.126.262,87</u>	
Jumlah SiLPA setelah perubahan			Rp.214.928.126.262,87
b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman			
1) Semula	Rp.	1.000.000.000,00	
2) Berkurang	Rp.	<u>(400.000.000,00)</u>	
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan			Rp. 600.000.000,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:			
a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>1.550.000.000,00</u>	
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan			Rp. 1.550.000.000,00
b. Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah			
1) Semula	Rp.	1.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah setelah perubahan			Rp. 1.000.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2007 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Walikota Batam menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Batam.
pada tanggal 24 September 2007

WALIKOTA BATAM


AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
pada tanggal 24 September 2007

SEKRETARIS KOTA BATAM


AGUSSAHIMAN, SH
NIP.420007623

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2007 NOMOR 07 SERI A

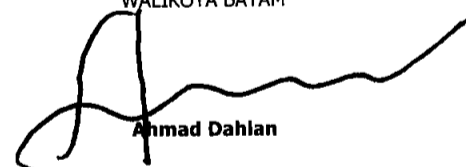
PEMERINTAH KOTA BATAM
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH,
BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN DAERAH
Tahun Anggaran 2007

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	105,329,000,000.00	111,080,269,589.00	5,751,269,589.00	5.18
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah	68,150,000,000.00	70,800,000,000.00	2,650,000,000.00	3.74
4.1.1.01.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	17,000,000,000.00	19,000,000,000.00	2,000,000,000.00	10.53
4.1.1.02.	Pajak Restoran	10,500,000,000.00	11,500,000,000.00	1,000,000,000.00	8.70
4.1.1.03.	Pajak Hiburan	3,750,000,000.00	4,200,000,000.00	450,000,000.00	10.71
4.1.1.04.	Pajak Reklame	3,300,000,000.00	3,500,000,000.00	200,000,000.00	5.71
4.1.1.05.	Pajak Penerangan Jalan Umum	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	0	0
4.1.1.06.	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	3,000,000,000.00	2,000,000,000.00	(1,000,000,000.00)	(50.00)
4.1.1.07.	Pajak Parkir	600,000,000.00	600,000,000.00	0	0
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	18,995,000,000.00	21,625,000,000.00	2,630,000,000.00	12.16
4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	10,090,000,000.00	11,895,000,000.00	1,805,000,000.00	15.17
4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	8,905,000,000.00	9,730,000,000.00	825,000,000.00	8.48
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	800,000,000.00	2,219,472,019.00	1,419,472,019.00	63.96
4.1.3.01.	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah / BUMD	800,000,000.00	2,219,472,019.00	1,419,472,019.00	63.96
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	17,384,000,000.00	16,435,797,570.00	(948,202,430.00)	(5.77)
4.1.4.02.	Pendapatan Jasa Giro	2,500,000,000.00	4,335,000,000.00	1,835,000,000.00	42.33
4.1.4.03.	Pendapatan Bunga Deposito	8,500,000,000.00	6,244,069,170.00	(2,255,930,830.00)	(36.13)
4.1.4.14.	Sumbangan Pihak Ketiga	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	0	0
4.1.4.15.	Penerimaan Hasil Penjualan Tiket	1,287,000,000.00	1,287,000,000.00	0	0
4.1.4.16.	Penerimaan Bunga Pinjaman	100,000,000.00	100,000,000.00	0	0
4.1.4.99.	Lain-lain Penerimaan	997,000,000.00	469,728,400.00	(527,271,600.00)	(112.25)
4.2.	Dana Perimbangan	580,210,000,000.00	509,539,207,635.00	(70,670,792,365.00)	(13.87)
4.2.1.	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	301,219,000,000.00	220,275,499,686.00	(80,943,500,314.00)	(36.75)
4.2.1.01.	Bagi Hasil Pajak	121,850,000,000.00	148,173,311,872.00	26,323,311,872.00	17.77
4.2.1.02.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	179,369,000,000.00	72,102,187,814.00	(107,266,812,186.00)	(148.77)
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	219,300,000,000.00	219,300,000,000.00	0	0
4.2.2.01.	Dana Alokasi Umum	219,300,000,000.00	219,300,000,000.00	0	0
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	13,791,000,000.00	13,791,000,000.00	0	0
4.2.3.01.	Dana Alokasi Khusus	13,791,000,000.00	13,791,000,000.00	0	0
4.2.4.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	45,900,000,000.00	56,172,707,949.00	10,272,707,949.00	18.29
4.2.4.01.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	45,900,000,000.00	56,172,707,949.00	10,272,707,949.00	18.29
4.3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	60,500,000,000.00	60,500,000,000.00	0	0
4.3.3.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	60,500,000,000.00	60,500,000,000.00	0	0
4.3.3.01.	Dana Penyesuaian	60,500,000,000.00	60,500,000,000.00	0	0
	Jumlah PENDAPATAN	746,039,000,000.00	681,119,477,224.00	(64,919,522,776.00)	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Tidak Langsung	291,597,638,136.50	310,060,430,707.72	18,462,792,571.22	5.95
5.1.1.	Belanja Pegawai	238,543,638,136.50	249,906,430,707.72	11,362,792,571.22	4.55
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	118,632,208,136.50	127,076,656,457.72	8,444,448,321.22	6.65
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	108,285,850,000.00	111,204,194,250.00	2,918,344,250.00	2.62
5.1.1.03.	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan	4,154,480,000.00	4,154,480,000.00	0	0
5.1.1.04.	Belanja Pemungutan Penerimaan Daerah	7,471,100,000.00	7,471,100,000.00	0	0
5.1.3.	Belanja Subsidi	0.00	0.00	0	0
5.1.3.02.	Belanja Subsidi kepada Masyarakat	0.00	0.00	0	0
5.1.4.	Belanja Hibah	0.00	0.00	0	0
5.1.4.01.	Belanja Hibah kepada Pemerintah	0.00	0.00	0	0
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	46,910,000,000.00	54,010,000,000.00	7,100,000,000.00	13.15
5.1.5.01.	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	46,910,000,000.00	54,010,000,000.00	7,100,000,000.00	13.52

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5. 1. 5. 02.	Belanja Bantuan Partai Politik dan KPUD	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	0	0
5. 1. 6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Kelurahan	4,344,000,000.00	4,344,000,000.00	0	0
5. 1. 6. 01.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kelurahan	2,556,000,000.00	2,556,000,000.00	0	0
5. 1. 6. 02.	Belanja Bagi Hasil Restribusi Daerah Kepada Kelurahan	1,788,000,000.00	1,788,000,000.00	0	0
5. 1. 8.	Belanja Tidak Terduga	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00	0	0
5. 1. 8. 01.	Belanja Tidak Terduga	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00	0	0
5. 2.	Belanja Langsung	588,441,361,863.50	584,037,172,779.15	(4,404,189,084.35)	(0.75)
5. 2. 1.	Belanja Pegawai	104,072,813,510.00	95,325,080,627.00	(8,747,732,883.00)	(9.18)
5. 2. 1. 01.	Honorarium PNS	25,636,181,930.00	26,429,644,047.00	793,462,117.00	3.00
5. 2. 1. 02.	Honorarium Non PNS	58,103,331,580.00	53,942,186,580.00	(4,161,145,000.00)	(7.71)
5. 2. 1. 03.	Uang Lembur	9,731,700,000.00	4,883,850,000.00	(4,847,850,000.00)	(99.26)
5. 2. 1. 05.	Belanja Beasiswa dan Bantuan Pendidikan PNS	4,054,950,000.00	3,804,950,000.00	(250,000,000.00)	(6.57)
5. 2. 1. 06.	Belanja Pendidikan Penjenjangan	775,500,000.00	775,500,000.00	0	0
5. 2. 1. 07.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	5,071,150,000.00	4,988,950,000.00	(82,200,000.00)	(1.65)
5. 2. 1. 09.	Belanja Penelitian dan Pengkajian Karya Ilmiah	700,000,000.00	500,000,000.00	(200,000,000.00)	(40.00)
5. 2. 2.	Belanja Barang dan Jasa	229,456,481,317.00	252,570,318,372.50	23,113,837,055.50	9.15
5. 2. 2. 01.	Belanja Bahan/Peralatan Pakal Habis	19,979,258,333.00	19,264,331,604.00	(714,926,729.00)	(3.71)
5. 2. 2. 02.	Belanja Bahan dan Material	18,293,192,739.00	21,458,585,939.00	3,165,393,200.00	14.75
5. 2. 2. 03.	Belanja Jasa Kantor	20,850,251,758.00	21,173,913,654.00	323,661,896.00	1.53
5. 2. 2. 04.	Belanja Premi Asuransi	864,000,000.00	864,000,000.00	0	0
5. 2. 2. 05.	Belanja Cetak, Penggandaan dan Dokumentasi	10,107,642,650.00	11,344,759,135.00	1,237,116,485.00	10.90
5. 2. 2. 06.	Belanja Sewa Tanah dan Gedung	4,878,457,000.00	5,087,865,400.00	209,408,400.00	4.12
5. 2. 2. 07.	Belanja Sewa Alat Angkut	399,550,000.00	572,550,000.00	173,000,000.00	30.22
5. 2. 2. 08.	Belanja Sewa Alat Berat	32,890,300.00	37,490,300.00	4,600,000.00	12.27
5. 2. 2. 09.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	1,046,807,000.00	2,133,707,004.00	1,086,900,004.00	50.94
5. 2. 2. 10.	Belanja Konsumsi	18,178,620,000.00	21,924,777,700.00	3,746,157,700.00	17.09
5. 2. 2. 11.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1,956,655,000.00	1,950,976,800.00	(5,678,200.00)	(0.29)
5. 2. 2. 12.	Belanja Pakaian Kerja dan Atributnya	685,456,000.00	685,317,500.00	(138,500.00)	(0.02)
5. 2. 2. 13.	Belanja Pakaian Khusus	2,299,140,000.00	2,186,001,000.00	(113,139,000.00)	(5.18)
5. 2. 2. 14.	Belanja Perjalanan Dinas	39,960,000,165.00	41,269,515,165.00	1,309,515,000.00	3.17
5. 2. 2. 17.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	26,815,791,124.00	34,434,438,868.50	7,618,647,744.50	22.13
5. 2. 2. 18.	Belanja Transportasi	12,490,470,100.00	15,367,510,100.00	2,877,040,000.00	18.72
5. 2. 2. 19.	Belanja Akomodasi	6,604,850,000.00	8,140,250,000.00	1,535,400,000.00	18.86
5. 2. 2. 20.	Belanja Pajak, Restribusi dan Iurang Lainnya	308,948,900.00	108,948,900.00	(200,000,000.00)	(183.57)
5. 2. 2. 21.	Belanja Pemeliharaan Tanah	204,000,000.00	408,000,000.00	204,000,000.00	50.00
5. 2. 2. 22.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11,750,016,648.00	14,027,223,358.00	2,277,206,710.00	16.23
5. 2. 2. 23.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	22,789,117,600.00	23,649,422,577.00	860,304,977.00	3.64
5. 2. 2. 24.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan	8,659,406,000.00	6,184,273,368.00	(2,475,132,632.00)	(40.02)
5. 2. 2. 25.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	84,960,000.00	84,960,000.00	0	0
5. 2. 2. 26.	Belanja Pemeliharaan Program Aplikasi Komputer	217,000,000.00	211,500,000.00	(5,500,000.00)	(2.60)
5. 2. 3.	Belanja Modal	254,912,067,036.50	236,141,773,779.65	(18,770,293,256.85)	(7.95)
5. 2. 3. 01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	7,638,180,670.00	6,314,575,500.00	(1,323,605,170.00)	(20.96)
5. 2. 3. 02.	Belanja Modal Pengadaan Alat Berat	40,000,000.00	40,000,000.00	0	0
5. 2. 3. 03.	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	9,187,583,630.00	9,126,023,630.00	(61,560,000.00)	(0.67)
5. 2. 3. 05.	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Air Bermotor	950,000,000.00	931,550,000.00	(18,450,000.00)	(1.98)
5. 2. 3. 06.	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Air Tidak Bermotor	18,000,000.00	18,000,000.00	0	0
5. 2. 3. 08.	Penghematan Pengeluaran Pembiayaan	64,000,000.00	64,000,000.00	0	0
5. 2. 3. 09.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan Pertanian, Perternakan dan Perikanan	4,500,000.00	4,500,000.00	0	0
5. 2. 3. 10.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	1,459,797,000.00	1,414,391,500.00	(45,405,500.00)	(3.21)
5. 2. 3. 11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	1,971,588,600.00	2,020,306,100.00	48,717,500.00	2.41
5. 2. 3. 12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	6,511,577,550.00	5,152,556,500.00	(1,359,021,050.00)	(26.38)
5. 2. 3. 13.	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	5,893,002,967.00	5,968,163,817.00	75,160,850.00	1.26
5. 2. 3. 14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	219,110,000.00	200,480,000.00	(18,630,000.00)	(9.29)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	340,137,000.00	627,149,200.00	287,012,200.00	45.76
5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	1,072,614,400.00	1,141,574,225.00	68,959,825.00	6.04
5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	168,150,000.00	168,150,000.00	0	0
5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	4,000,000.00	154,000,000.00	150,000,000.00	97.40
5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	7,158,466,598.00	7,158,466,598.00	0	0
5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	1,992,650,000.00	1,952,806,860.00	(39,843,140.00)	(2.04)
5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	50,874,250,925.00	46,164,860,554.64	(4,709,390,370.36)	(10.20)
5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan dan Pelantar	8,393,044,000.00	9,342,385,954.01	949,341,954.01	10.16
5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	15,315,700,000.00	10,391,107,000.00	(4,924,593,000.00)	(47.39)
5.2.3.24.	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	0	0
5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik/Telepon	831,300,000.00	1,154,300,000.00	323,000,000.00	27.98
5.2.3.26.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian Bangunan	115,755,714,750.00	107,964,783,399.00	(7,790,931,351.00)	(7.22)
5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	1,544,520,000.00	1,544,520,000.00	0	0
5.2.3.28.	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	436,808,000.00	452,908,000.00	16,100,000.00	3.55
5.2.3.30.	Belanja Modal Alat-alat Peralatan/Keamanan	81,175,800.00	81,175,800.00	0	0
5.2.3.31.	Belanja Modal Pengadaan Pengaman Tebing dan Pantai	4,283,732,000.00	4,075,202,000.00	(208,530,000.00)	(5.12)
5.2.3.32.	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Jalan	2,702,463,146.50	2,513,837,142.00	(188,626,004.50)	(7.50)
Jumlah BELANJA		880,039,000,000.00	894,097,603,486.87	14,058,603,486.87	
Surplus / (Defisit)		(134,000,000,000.00)	(212,978,126,262.87)	(78,978,126,262.87)	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	135,000,000,000.00	215,528,126,262.87	80,528,126,262.87	37.36
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	134,000,000,000.00	214,928,126,262.87	80,928,126,262.87	37.65
6.1.1.01.	Pelampauan Penerimaan PAD	0.00	13,109,410,697.72	13,109,410,697.72	100.00
6.1.1.02.	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	109,000,000,000.00	117,194,043,477.51	8,194,043,477.51	6.99
6.1.1.04.	Penghematan Belanja	25,000,000,000.00	81,124,672,087.64	56,124,672,087.64	69.18
6.1.1.07.	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	0.00	0.00	0	0
6.1.1.08.	Penghematan Pengeluaran Pembiayaan	0.00	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00	100.00
6.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	1,000,000,000.00	600,000,000.00	(400,000,000.00)	(66.67)
6.1.5.01.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	1,000,000,000.00	600,000,000.00	(400,000,000.00)	(66.67)
6.1.7.	Transfer Antar Rekening Kas daerah	0.00	0.00	0	0
6.1.7.01.	Transfer Antar Rekening Kas daerah	0.00	0.00	0	0
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		135,000,000,000.00	215,528,126,262.87	80,528,126,262.87	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	1,000,000,000.00	2,550,000,000.00	1,550,000,000.00	60.78
6.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0.00	1,550,000,000.00	1,550,000,000.00	100.00
6.2.2.02.	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	0.00	1,550,000,000.00	1,550,000,000.00	100.00
6.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0	0
6.2.4.01.	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0	0
6.2.6.	Transfer Antar Rekening Kas Daerah	0.00	0.00	0	0
6.2.6.01.	Transfer Antar Rekening Kas Daerah	0.00	0.00	0	0
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		1,000,000,000.00	2,550,000,000.00	1,550,000,000.00	
Pembiayaan neto		134,000,000,000.00	212,978,126,262.87	78,978,126,262.87	
Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA/SIKPA)		0	0	0	

BATAM, 24 September 2007
WALIKOTA BATAM


Ahmad Dahlan